

HISTORY OF PAGOEJOEBAN PASOENDAN 1913-1942

Sejarah Pagoejoeban Pasoendan 1913-1942

Aldi Cahya Maulidan ^{1a(*)}

¹Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

^aaldicahya58@gmail.com

(*) Corresponding Author

aldicahya58@gmail.com

How to Cite: Aldi Cahya Maulidan. (2024). History Of Pagoejoeban Pasoendan 1913-1942, doi: 10.36526/js.v3i2.

Received: 18-02-2024
 Revised : 11-02-2024
 Accepted: 30-05-2024

Keywords:

Paguyuban Pasundan,
 GAPI,
 PPPKI

Abstract

The research is entitled "History Of Pagoejoeban Pasoendan 1913-1942". The author takes the topic of Paguyuban Pasundan with the title above, because based on the results of the literature study that the author did, that there are still few works that discuss Paguyuban Pasundan, even though the role of Paguyuban Pasundan as an organization has a major impact on the Indonesian independence movement both nationally and West Java. A literature study or literature review was used in this study. Research sources are relevant books and journals. 1. Determination of research topics, 2. Identify keywords, 3. Literature search, 4. Literature selection, 5. Literature review, 6. Drafting of conceptual frameworks, 7. Literature analysis, 8. Review of writing literature, 9. Revisions and improvements, and 10. Literature addition. The analysis process consists of three stages: data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that Paguyuban Pasundan was born because of disappointment with Budi Utomo's organization which prioritized the interests of Javanese and Madurese. So because of these factors, an organization that accommodates Sundanese people was established, namely Paguyuban Pasundan. At the beginning of the establishment of the Paguyuban Pasundan organization moved for the benefit of the Sundanese people but turned into a national interest as evidenced by the period 1927-1942 establishing PPPKI, GAPI and active in the Volksraad. The Pasundan Guyuban movement covers the fields of Politics, Social, Economy, and Education.

PENDAHULUAN

Paguyuban Pasundan adalah sebuah organisasi etnis orang-orang Sunda yang lahir di Batavia (sekarang Jakarta) dan berkembang didaerah Jawa Barat serta masih eksistensi hingga saat ini. Eksistensi organisasi Paguyuban Pasundan berbeda nasibnya dengan organisasi lain yang tumbuh dan berkembang bersama Paguyuban Pasundan. Keberadaan mereka kini telah lama tiada. Selama bertahun-tahun, Paguyuban Pasundan telah memainkan peran yang signifikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Namun perjuangan pergerakan organisasi Paguyuban Pasundan tersebut tidak terlalu dikenal oleh masyarakat pada umumnya, hal tersebut dibuktikan dengan tidak banyak tulisan yang menjelaskan tentang sikap, tindakan, dan upaya Paguyuban Pasundan dalam masa-masa pergerakan nasional. Padahal peranan organisasi pasundan sangat berdampak sekali bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jawa Barat pada khususnya. Tulisan ini mengkaji peran Paguyuban Pasundan dalam periode 1913-1942.

Dikaji berdasarkan fakta sejarahnya, pergerakan organisasi dalam kurun waktu 1913-1942 merupakan periode penting dalam sejarah organisasi pasundan. Fakta tersebut terjadi karena pada periode tersebut organisasi pasundan didirikan yang disebabkan karena kekecewaan kaum terpelajar orang sunda terhadap organisasi Budi Utomo. Budi Utomo yang lebih dulu lahir pada tanggal 20 Mei 1908 merupakan organisasi pelopor pergerakan nasional di Indonesia (Ricklefs, 2008). Keberadaan organisasi-organisasi masyarakat pribumi pada zaman pemerintah Hindia-Belanda tersebut tidak terlepas dari peranan orang Belanda yaitu Eduard Douwes Dekker. Beliau merupakan penulis berasal dari Belanda yang menulis tentang praktik penjajahan pemerintah Belanda di Hindia-Belanda. Tulisan tersebut dimuat dalam buku yang berjudul Max Havelaar, karena

peranan buku tersebut yang sampai kepada kerajaan Belanda, pemerintah kerajaan Belanda melalui gubernur jendral Hindia-Belanda mengeluarkan kebijakan yang bernama politik etis. Kebijakan politik etis ini berdampak kepada kebebasan masyarakat lokal pada saat itu untuk bisa berserikat dan membentuk organisasi, sehingga pada periode tersebut, banyak bermunculan organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Paguyuban Pasundan, Sarekat Islam, dll. Budi Utomo yang merupakan pelopor organisasi pergerakan nasional di dalam awal perjalanannya masih lebih mementingkan etnis tertentu. Hal ini dibuktikan dengan pergerakan dari organisasi tersebut lebih mementingkan kepada orang-orang Jawa dan Madura. Sehingga kaum terpelajar orang sunda mendirikan organisasi yang serupa pergerakannya seperti Budi Utomo yaitu Paguyuban Pasundan yang berdiri pada tahun 1913 di Batavia (Suharto, 2002).

Paguyuban Pasundan (Pagoejoeban Pasoendan) merupakan sebuah organisasi yang berdiri berdasarkan Etnis, bahasa, dan kebudayaan, organisasi Paguyuban Pasundan ini didirikan oleh etnis Sunda yang bermukim di Batavia. Pada perjalanannya organisasi ini mengalami perkembangan yang pesat bahkan pergerakannya tidak hanya dalam bidang pendidikan, melainkan terlibat juga pada bidang sosial dan politik sebelum nantinya dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Hal tersebut membuat penulis tertarik meneliti sejarah Paguyuban Pasundan 1913-1942.

METODE

Penelitian dengan judul " Sejarah Pagoejoeban Pasoendan 1913-1942". Pendekatan kualitatif digunakan sebagai cara untuk menulis artikel ini. Taylor & Bogdan mengatakan metode kualitatif digunakan dalam penelitian untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia melalui analisis deskriptif, interpretatif, dan analisis data non-angka, seperti teks, gambar, suara, atau video. Ini berbeda dengan metode kuantitatif, yang berfokus pada pengukuran dan analisis data numerik, dan metode kualitatif lebih berfokus pada memahami konteks, makna, dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Tujuan utama dari penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang kompleks dan multifaset, seperti perilaku manusia, interaksi sosial, budaya, atau pengalaman individu serta tentang bagaimana orang memahami, mengalami, dan membuat makna dari dunia di sekitar mereka (Moleong, 2017).

Penelitian kualitatif deskriptif dapat digunakan untuk mempelajari dan menjelaskan makna masalah sosial dengan menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang relevan. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dan teknik penelitian kepustakaan (Creswell, 2016). Metode kepustakaan dalam arti lain disebut sebagai "studi literatur". Merupakan proses penelitian sistematis dan menyeluruh tentang literatur yang ada dengan topik tertentu. Penelitian tersebut melibatkan pengumpulan data, evaluasi, sintesis, dan interpretasi informasi dari berbagai sumber literatur. Riset tersebut menerapkan cara mengumpulkan data dengan melihat buku, makalah ilmiah, jurnal, dan bahan tertulis lainnya yang relevan dengan subjek penelitian. Peneliti menganalisis data deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2017). Pencarian literatur adalah langkah pertama menuju pembuatan kerangka penelitian dan teknik pengumpulan data penelitian (Zed, 2018). Hal ini mendukung pernyataan di atas. Dengan menggunakan penelitian empiris yang relevan yang telah dilakukan, gagasan yang lebih kuat diharapkan untuk dikembangkan dan dibangun.

Kajian kepustakaan digunakan dalam beberapa tahapan. Pertama, identifikasi topik, tentukan topik atau pertanyaan penelitian yang ingin dipelajari oleh peneliti. Pastikan topik tersebut relevan dan memiliki literatur yang cukup tersedia. Kedua, peneliti mengumpulkan data awal, yaitu sumber tertulis yang dianggap relevan dengan subjek penelitian. Sumber literatur ini termasuk buku, artikel ilmiah, dan jurnal. Untuk mendapatkan temuan yang relevan, gunakan kata kunci yang sesuai dengan topik peneliti. Ketiga, pemeriksaan literatur. Lihat literatur yang dikumpulkan peneliti. Lihat kredibilitas, keandalan, kebaruan, dan relevansi setiap sumber. Pertimbangkan juga metodologi yang digunakan dalam penelitian yang relevan. Keempat, sintesis informasi. Identifikasi hasil utama dari literatur yang telah ditinjau oleh peneliti. Tentukan pola, tren, persamaan, dan perbedaan dengan studi sebelumnya. Kelima, analisis dan interpretasi. Dengan menganalisis hasil dan interpretasi dari berbagai sumber literatur, peneliti dapat meningkatkan

pemahaman perihal tentang topik yang diteliti. Identifikasi informasi yang tidak lengkap atau pertanyaan penelitian yang belum dijawab. Penulis mengolah data dengan memberikan penjelasan singkat tentang kolerasi dari kategori yang dipelajari melalui reduksi data. Keenam, peneliti menarik kesimpulan awal yang sementara, dan kesimpulan ini dapat berubah jika ditemukan beberapa informasi penting tentang pengumpulan data. Ketujuh, untuk menguji keabsahan data, sumber data harus ditriangulasi. Kedelapan. Membuat kesimpulan dari penelitian. Kesembilan, tinjauan literatur. Buat laporan atau artikel yang ringkaskan hasil penelitian. Pastikan informasi disampaikan dengan jelas, sistematis, dan didukung dengan bukti dari literatur yang dikaji (Cooper, 2015). Selama menulis artikel, tahapan-tahapan ini digunakan sebagai referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Lahirnya Paguyuban Pasundan

Orang-orang Sunda masuk ke Budi Utomo setelah lahir pada tanggal 20 Mei 1908 dan terbuka bagi semua orang di Pulau Jawa. Orang Sunda pada waktu itu belum begitu semangat. Meskipun anggota baru organisasi itu menikmatinya, mereka tidak memiliki perspektif masa depan. Tidak ada dari mereka yang memegang jabatan di badan pengurus. Tidak banyak orang Sunda yang bergabung dengan Budi Utomo di Jakarta. Cabang Budi Utomo didirikan di Bandung, tetapi tidak lama kemudian terbagi menjadi dua: bagian "A" untuk orang Jawa dan bagian "B" untuk orang Sunda, yang dipimpin oleh D.K. Ardiwinata. Cabang Budi Utomo memiliki sekitar 500 anggota pada tahun 1910 (Ali, & Moh, 1972). Pada tahun tersebut, Budi Utomo juga berdiri di Bogor, dengan jumlah keanggotaan sebanyak 150 orang. Namun, setahun kemudian, jumlah anggota menurun drastis, hingga hanya tinggal 25 orang. Orang-orang Sunda yang tidak puas dengan organisasi itu keluar dari Budi Utomo. Mereka berpendapat bahwa hanya orang Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memenuhi manfaat dari adanya Budi Utomo.

Pendirian Budi Utomo pada 20 Mei 1908, yang dianggap sebagai titik awal kebangkitan bangsa Indonesia, memengaruhi kelahiran Paguyuban Pasundan secara tidak langsung. Banyak orang Sunda bergabung dengan Budi Utomo pada awalnya, tetapi beberapa tahun kemudian keanggotaan orang Sunda berkurang. Ini mendorong siswa Sunda di STOVIA untuk membentuk organisasi khusus untuk orang Sunda. Pada 20 Juli 1913, setelah D. K. Ardiwinata menyetujuinya, organisasi ini resmi didirikan dengan nama "Pagoejoeban Pasoendan" (Irshanto, 2016).

Paguyuban Pasundan dibentuk dengan hanya ada delapan murid Sunda di STOVIA: Mas Dajat Hidajat (lahir pada tahun 1890), Raden Djoendjoenan Setiakoesoemah (lahir pada tahun 1892), Asikin (lahir pada tahun 1891), Moeh Djoehana, Abdoel Patah, Slamet, dan Iskandar. Meskipun beberapa orang menyukai masalah politik, mereka belum berkumpul. Mereka tidak memasukinya karena mereka tidak terlalu tertarik pada organisasi Budi Utomo. R. Djoendjoenan Setiakoesoemah ditunjuk sebagai perwakilan *Indische Partij* di STOVIA karena ketertarikannya pada organisasi tersebut (Lubis, 2015). Selain itu, ia terlibat dalam penciptaan Sarekat Islam di daerah Jakarta dan bahkan menjadi pendukungnya. Setiap malam Minggu, mereka berkumpul, berbicara dalam bahasa Sunda, tertawa, dan melakukan hal-hal lainnya. Setelah kembali ke rumah masing-masing dari liburan, mereka segera berkumpul untuk berbagi oleh-oleh. Rumah D.K. Ardiwinata di Gang (sekarang jalan) Paseban, Salemba, Jakarta, yang dianggap sebagai sesepuh mereka, sering dikunjungi siswa. Cinta mereka terhadap tempat, bahasa, dan budaya mereka meningkat sebagai hasil dari pertemuan-pertemuan ini. Pemikiran politik berkembang. Mereka ingin melakukan hal yang sama seperti Budi Utomo karena mereka merasa lahirnya sangat penting bagi mereka. Siswa STOVIA dari Sunda percaya bahwa orang Sunda memerlukan organisasi sendiri. Mereka juga percaya bahwa orang Sunda harus bersatu, terutama mereka yang berada di luar daerahnya (Lubis, 2016).

Mas Dajat Hidajat mengadakan musyawarah di STOVIA saat tidak ada kelas dan memutuskan untuk mendirikan sebuah organisasi untuk orang-orang Sunda. Dalam musyawarah tersebut juga diputuskan bahwa D.K. Ardiwinata, R. Iskandar Brata, dan R. Emoeng Poerawinata akan bertanggung jawab sebagai ketua organisasi yang akan didirikan. Akhirnya, mereka setuju

untuk menunjuk D.K. Ardiwinata sebagai ketua, dan R. Djoendjoenan Setiakoesoemah ditunjuk untuk memberi tahu D.K. Ardiwinata tentang hasil musyawarah. Selain itu, mereka akan menghubungi teman-teman mereka yang berada di luar STOVIA untuk bergabung dengan Paguyuban Pasundan dan akan memberikan dukungan sepenuhnya untuk inisiatif tersebut (Hendayana, 2016). Sejak tahun 1913, para siswa yang berusia sekitar 22 tahun sering berkunjung ke rumah D.K. Ardiwinata di Gang Paseban, Salemba, Jakarta, untuk menyampaikan maksud mereka. Djaka Hidajat adalah siswa yang paling sering berkunjung ke rumahnya. Mereka ingin membangun organisasi untuk orang Sunda seperti yang dilakukan dr. Soetomo dengan mendirikan BUDI UTOMO, dan mereka ingin agar orang tua membimbing mereka. D.K. Ardiwinata menyanggupi permintaan itu (Erawan, & Memed, 1991).

Setelah menyanggupi untuk mendirikan perkumpulan, diadakan pertemuan di rumah D.K. Ardiwinata pada hari Minggu, 20 Juli 1913. Siswa HBS, KWS, dan STOVIA mengundang Oto Soebrata, Loekman Djajadiningrat, Achmad Zoehra, Soetadinata, Ashari, orang tua, dan lainnya ke rapat tersebut. Rapat memilih untuk membentuk organisasi "Pasoendan", memilih pengurus, dan menetapkan tujuan sementara. Tujuan organisasi adalah sebagai berikut (Shandy, 2018): 1. Memajukan budaya dan bahasa Sunda; 2. Memajukan ilmu pengetahuan dari bahasa Belanda; 3. Berpartisipasi aktif dalam pengembangan pengetahuan orang Sunda; dan 4. Tidak terlibat dalam pemerintahan negara. Untuk menjadi anggota, setiap orang Sunda yang berusia minimal 18 tahun dan siapa saja yang merasa senang dan sayang terhadap orang Sunda dan tanah airnya dapat menjadi anggota. Rapat juga memutuskan untuk membuat buletin *Papaes Nonoman*. Nama ini berasal dari hadits Nabi Muhammad yang berarti "perhiasan wanita tertawa, perhiasan laki-laki ilmu."

D.K. Ardiwinata sangat berperan dalam pembentukan Paguyuban Pasundan, selain beberapa siswa yang memiliki ide untuk membentuk organisasi untuk orang Sunda. Pada tahun 1866, Ardiwinata lahir di Bandung. Raja adalah kakek dari Makassar, dan ibunya berasal dari Priangan. Setelah diberikan gelar "kanduruan" (gelar yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada guru yang cakap dan banyak jasanya) pada tahun 1912, ia menggunakan gelar "daeng" (sebagai ciri keturunan bangsawan Makassar) (Irshanto, B. A. 2017). Ia menyelesaikan sekolah dasar pada tahun 1881 dan masuk sekolah guru bumi putera (kweekschool) di Bandung dalam waktu tiga tahun. Dua tahun kemudian, pada tahun 1886, ia diangkat menjadi guru. Dia pertama kali bekerja di sekolah dasar di Cibadak, kemudian pindah ke Sekolah Kelas I di Karang Pamulangan, sebelum kembali ke OSVIA sebagai guru bahasa Melayu pada tahun 1901. Karena keahliannya sebagai pengarang, dia pindah ke Jakarta pada tahun 1911 dan bekerja di Balai Pustaka sebagai pemimpin redaksi bahasa Sunda sampai 1917. Di sinilah ia menjadi terkenal setelah menjadi pemimpin siswa Sunda di STOVIA dan akhirnya mendirikan Paguyuban Pasundan (Ekadjati, 2004).

Para anggota pengurus Paguyuban Pasundan melakukan propaganda ke Serang, Bogor, Purwakarta, Cirebon, Kuningan, Bandung, Tasikmalaya, dan Cianjur selama libur panjang. Mereka mendapat sambutan hangat di semua tempat yang mereka kunjungi, dan semua orang setuju bahwa Paguyuban Pasundan harus tetap ada. Banyak orang yang menjadi anggota, sehingga total 800 orang menjadi anggota ketika mereka kembali ke Jakarta (Suharto, 2002). Pengurus Paguyuban Pasundan memikirkan untuk meminta izin bergerak dari pemerintah setelah berusia setahun lebih. Pengurus, dengan tanda tangan D.K. Ardiwinata sebagai Ketua dan Iskandar Brata sebagai Sekretaris I, mengajukan permohonan pengesahan kepada pemerintah Hindia Belanda pada 22 September 1914. Pemerintah segera membuat keputusan tidak lama kemudian karena statuten, atau Anggaran Dasar, itu moderat. Paguyuban Pasundan secara resmi diizinkan untuk beroperasi dengan surat keputusan pemerintah No. 46 tanggal 9 Desember 1914. Pengurus Besar Paguyuban Pasundan pertama terdiri dari sembilan orang, menurut Anggaran Dasarnya (pasal 25), termasuk seorang ketua, seorang wakil ketua, dua sekretaris, seorang bendahara, dan empat komisaris. Lima pengurus besar dan satu siswa berada di Jakarta. Menurut D.K. Ardiwinata, Ahmad Djajadiningrat, bupati Serang saat ini, diangkat sebagai ketua kehormatan, dan C.M. Pleijte, direktur van Onderwijs en Eeredienst, diangkat sebagai pelindung (Azmi, 2020).

Ideologi Organisasi Paguyuban Pasundan

Paguyuban Pasundan melakukan kegiatan politik setelah dibentuk volksraad pada bulan Mei 1918 (Utomo, 1995). Empat bagian dari Anggaran Dasarnya diubah, dan diajukan untuk disetujui oleh pemerintah. Paguyuban Pasundan menjadi organisasi yang bekerja di tiga bidang: politik, ekonomi, dan sosial pada tanggal 13 Juni 1919 dengan Surat Keputusan Pemerintah No. 72 yang mengesahkan pasal-pasal tersebut. Beberapa tahun setelah Paguyuban Pasundan menjadi organisasi politik, ideologi baru, nasionalisme, masuk ke Indonesia melalui para mantan anggota PI yang kembali ke tanah air dan majalahnya, Indonesia Merdeka. Bagi Paguyuban Pasundan, dan organisasi lokal lainnya, ini merupakan angin baru. Teori persatuan nasional, yang merupakan inti dari nasionalisme, berkembang lebih cepat mulai tahun 1924, setelah berdirinya *studieclub-studieclub* dan kemudian lebih kuat lagi setelah berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI) di bawah pimpinan Ir. Soekarno (Sitorus, 1947). Pada akhirnya, Paguyuban Pasundan dan organisasi serupa menerima ideologi baru. Salah satu buktinya adalah Komite "Persatuan Indonesia" yang dibentuk pada bulan September 1926. Tujuannya adalah untuk menggabungkan ideologi politik yang berbeda ke dalam pergerakan nasional. Komite itu terdiri dari Paguyuban Pasundan, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Budi Utomo, serta organisasi lokal seperti Persatuan Minahassa (PM), Sarekat Ambon (SA), dan Sarekat Madura. Subkomite di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta dipimpin oleh Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo, Mr. Sartono, dan Mr. Soejoedi. Akan tetapi komite ini tidak berhasil membentuk organisasi federal atau non-federal. Paguyuban Pasundan menyatakan dalam komite tersebut bahwa mereka juga ingin persatuan nasional dan mendukung nasionalisme, terutama nasionalisme Indonesia. Paguyuban Pasundan berubah dari menjadi kelompok etnis menjadi kelompok etnonasionalis dengan menerima ideologi baru ini (Ekadjati, 2014).

Tahun 1927, Ir. Soekarno membuat gagasan untuk menyatukan semua partai politik dalam satu wadah. Dalam upaya terakhir untuk membentuk PNI, yang dimulai pada bulan Juni 1927, ia memperluas proposal yang telah dibuat sebelumnya dan menuntut pembentukan federasi partai politik Indonesia. Dia percaya bahwa federasi yang akan dibentuk hanya akan mencerminkan keadaan sosial dan politik Indonesia yang terdiri dari berbagai aliran organisasi. Akibatnya, dia percaya bahwa badan federasi itu harus memiliki struktur yang longgar tetapi sekaligus berfungsi sebagai "*front sawo matang*" yang ketat melawan Belanda (Lubis, & Nina, 2003). Anggaran Dasar Federasi yang dirancang oleh Soekarno bekerja sama dengan dr. Soekiman (SI) dibagikan kepada peserta kongres SI di Pekalongan pada September 1927 untuk dibahas. Anggaran Dasar menyatakan bahwa badan federasi yang akan dibentuk tidak akan membawahi partai politik yang ada. Mereka akan bergerak secara bebas dan hanya akan melakukan kegiatan dalam bidang yang telah disetujui bersama. Semua keputusan akan dibuat secara mufakat.

Pada pidatonya di kongres, Soekarno menjelaskan secara rinci tiga pasal utama dari rancangan anggaran dasar federasi. Ia mengklaim bahwa pasal-pasal tersebut tetap memberikan kebebasan kepada setiap organisasi anggota untuk mengambil bagian dalam kegiatan apa pun yang mereka inginkan, dan bahwa pasal-pasal tersebut mempertimbangkan semua jenis gerakan nasionalis yang mungkin ada. Semua anggota partai yang ada harus mencapai kesepakatan untuk menerima anggota tambahan. Proporsi PNI dan SI untuk bergabung dengan badan federasi tersebut disetujui oleh kongres. Kongres juga memberikan kepercayaan kepada Soekarno untuk membuat rencana yang lengkap. Soekarno segera mengambil tindakan; dalam beberapa minggu, undangan diberikan kepada beberapa partai politik, termasuk Paguyuban Pasundan, untuk membentuk badan federasi. Rancangan anggaran dasar federasi dikirim ke semua pengurus besar partai sebelum rapat (Frakking, 2016).

Delapan organisasi menghadiri rapat pembentukan badan federasi di Bandung pada 17–18 Desember 1927. R. Oto Koesoema Soebrata, Bakri Soerjatmadja, dan Sutisna Sendjaja mewakili Paguyuban Pasundan dalam pertemuan tersebut. Dalam rapat itu, Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI atau P3KI) didirikan, dan rancangan Anggaran Dasar Federasi yang dirancang oleh Ir. Soekarno dan dr. Soekiman diterima (Mulyana, 1999). Organisasi di dalam federasi berusaha untuk menyamakan tindakan di seluruh

negeri dengan memperkuat organisasi dan mendorong kerja sama. Dengan demikian, diputuskan bahwa federasi ini tidak akan mencapai kesepakatan mengenai asas karena keyakinan partai-partai yang tergabung berbeda. Keputusan yang dibuat hanya dengan suara bulat akan mengikat semua anggota. Namun, jika tidak ada kesepakatan, keputusan hanya dibuat oleh partai yang menyetujuinya. Selain itu, suatu Majelis Pertimbangan dibentuk sebagai alat tetap federasi, yang terdiri dari wakil dari partai-partai anggota, seorang ketua, dan seorang sekretaris dan bendahara. Kedua orang yang disebut permulaan memegang jabatan Pengurus Harian, tetapi mereka tidak memiliki hak suara.

Setelah berpartisipasi dalam rapat pembentukan badan federasi itu, Paguyuban Pasundan menjadi anggota. Fokusnya meningkat pada masalah politik, sehingga orang-orang umumnya melihat masuknya perkumpulan itu ke dalam PPPKI sebagai langkah yang masuk akal. Hampir lima bulan setelah PPPKI didirikan, pada 20 Mei 1928, cabang Paguyuban Pasundan berkumpul di Jakarta untuk membahas masalah jumlah anggota yang berkurang. Propaganda nasionalis PNI menyebabkan anggota Paguyuban Pasundan meninggalkan perkumpulan itu. Nasionalisme Indonesia membutuhkan rasa kedaerahan di mana pun. Dalam pertemuan itu, Paguyuban Pasundan menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada bangsa yang abadi dan bahwa semua orang harus berusaha menuju cita-cita bangsa. Paguyuban Pasundan berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya memajukan rakyat. Setuju, Paguyuban Pasundan melihat kemajuan menuju persatuan dan cinta tanah air Indonesia. Oleh karena itu, Paguyuban Pasundan bergabung dengan badan federasi dengan harapan keadaan akan menjadi lebih baik dengan PPPKI. Keputusan yang dibuat dalam rapat tersebut adalah untuk berusaha mempertahankan anggota Sunda dalam Paguyuban Pasundan (Amin, & Sjarif, 1984).

Paguyuban Pasundan, dipimpin oleh R. Oto Koesoema Soebrata, putra seorang bekas Bupati Ciamis dan anggota *Volksraad*, beroperasi dengan tenang di berbagai bidang sosial selama tahun 1928. Pengurus Besar bekerja sama dengan pemerintah, pejabat pemerintah, dan dewan kabupaten, masing-masing dengan wakil. Dalam kongres Paguyuban Pasundan yang diadakan di Tasikmalaya pada 30 Maret hingga 1 April 1929, pendirian perkumpulan itu menjadi lebih tegas. R. Oto Koesoema Soebrata, ketuanya, menyatakan bahwa orang Sunda hanyalah sebagian dari Indonesia. Dalam hal Paguyuban Pasundan berusaha memajukan wilayah Pasundan dalam hal sosial, ekonomi, dan kebudayaan, jangan diartikan seakan-akan Pasundan memisahkan atau mengasingkan diri dari golongan rakyat yang lain (Suharto, 2002). Menurut tutur ketua, Bahasa Indonesia dan Bahasa Belanda digunakan sebagai jembatan (alat komunikasi) dengan kelompok masyarakat yang berbeda.

Berdasarkan landasan kepercayaan rasa persatuan, Paguyuban Pasundan bekerja sama dengan organisasi lain dalam PPPKI untuk kepentingan Indonesia, tetapi mereka akan mengutamakan aktivitasnya di wilayah Sunda karena mereka adalah bagian dari nusa dan bangsa Indonesia. Dengan bekerja sama dengan pemerintah, perkumpulan akan mencapainya dengan cara yang damai. Setelah itu, beberapa anggota menjadi tidak puas dengan kerukunan PPPKI. PISI keluar karena pertengkaran anggotanya, dan PNI membangun federasi pada tahun 1930, tetapi tidak aktif karena tokoh-tokohnya ditangkap, termasuk Ir. Soekarno, dan partai itu dibubarkan pada tahun 1931. Di bawah kondisi PPPKI ini, partai-partai Indonesia lainnya semakin tertarik untuk bergabung dalam fusi, yang dianggap lebih stabil daripada federasi. Dalam kongres Budi Utomo yang diadakan di Jakarta antara tanggal 3 April dan 4 April 1931, rencana fusi itu pada dasarnya disetujui. Karena itu, organisasi bersedia untuk dibubarkan. Paguyuban Pasundan menyadari pergeseran fokus yang terjadi dari federasi ke fusi. Antara 4 dan 5 April 1931, perkumpulan itu dengan sengaja mengundang dua tokoh: Mr. Sartono dari PNI untuk berbicara tentang uni dan Dr. Sam Ratoelangi dari Persatoean Minahasa untuk berbicara tentang federasi. Paguyuban Pasundan menjelaskan keduanya dengan tujuan untuk memahaminya sepenuhnya dan kemudian memutuskan cara terbaik untuk mencapai tujuan nasional, yaitu kemerdekaan Indonesia (Fauziah, 2023).

Pada rapat terbuka tanggal 5 April 1931 dan kemudian rapat tertutup, kongres mengeluarkan resolusi bahwa Paguyuban Pasundan akan memperkuat dan memperbaiki front

persatuan partai-partai politik dalam bentuk federasi, khususnya PPPKI. Dalam hal bentuk fusi yang diinginkan Budi Utomo, perkumpulan itu berpendapat bahwa fusi partai-partai politik kebangsaan harus segera dilakukan. Sejak tahun 1931, ketika perkumpulan dipimpin oleh R. Oto Iskandar di Nata, fokusnya menjadi lebih pada politik, berjuang untuk posisi di Dewan Kabupaten, Dewan Propinsi, dan *Volksraad* (Lubis, & Herlina, 2012). Perkumpulan memperhatikan banyak hal, terutama sifat kedaerahan yang dibutuhkan oleh nasionalisme Indonesia. Paguyuban Pasundan menjadi partai politik berdasarkan nasionalisme dan terbuka menyatakan simpatinya terhadap kelompok radikal seperti Partai Indonesia (Partindo) dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru). Mereka berjuang untuk mendapatkan Indonesia merdeka dan mencapai tujuan federasi Indonesia.

Sementara Oto Iskandar di Nata memimpin Paguyuban Pasundan, rencana fusi yang diusulkan oleh Budi Utomo dari tahun 1934 hingga 1935 masih dalam proses. Pada akhirnya, berkat upaya Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI), keduanya melebur pada akhir Desember 1935, membentuk Partai Indonesia Raya (Parindra). Selama pertemuan peleburan di Solo, Sarekat Sumatera, Tirtayasa, dan Sarekat Celebes juga melebur pada awal tahun 1936. Partai baru itu memiliki banyak pemimpin terkenal, seperti Moh. Husni Thamrin, Mr. Isqaq Tjokrohadisoerjo, dan Mr. Soenarjo. Anggaran Dasar Parindra menyatakan bahwa mereka berusaha untuk mencapai "Indonesia yang besar dan luhur" dengan memperkuat nasionalisme Indonesia, melakukan tindakan politik sampai terbentuk sistem pemerintahan yang didasarkan pada nasionalisme dan demokrasi, dan meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi rakyat (Dimiyati, & Muhammad, 1950).

Pada kongres ke-21 yang diadakan di Bandung pada awal April 1936, Paguyuban Pasundan menyatakan melalui telegram bahwa mereka tidak akan hadir dalam rapat fusi. Pasundan mengikuti keputusan kongres tahun 1931 untuk tidak menyetujui fusi tetapi menyetujui federasi. Dalam kongres ke-21, yang dihadiri oleh 34 cabang dari 52 cabang perkumpulan, Pasundan Istri (Pasi), yang memiliki 24 cabang, belum memutuskan untuk meleburkan diri dalam Parindra (Nitisastro, & Widjojo, 1970). Pasundan tidak yakin apakah meleburkan diri akan bermanfaat atau tidak. Keputusan kongres yang dibuat oleh sebagian pergerakan menimbulkan pertanyaan tentang motivasi pergerakan itu. *Harian Tjaja Timoer* mencari dasar hukum yang dalam untuk menjawab pertanyaan itu. Menurut diskusi yang dilakukan redaksi harian itu dengan para pemimpin Paguyuban Pasundan sebelum dan sesudah kongres, sikap yang diambil itu sangat bermanfaat bagi bangsa dan tanah air Indonesia, terutama bagi daerah dan penduduk Pasundan. *Harian ini* dan sejumlah pemimpin Pasundan menyatakan bahwa perbedaan antara kelompok terletak pada tujuan utamanya. Bagi Partindo, Budi Utomo, dan PBI, tujuan utamanya adalah politik. Sebaliknya, bagi Paguyuban Pasundan, politik adalah alat untuk mencapai perbaikan di bidang ekonomi, sosial, dan lainnya. Dengan memiliki banyak sekolah, mudah untuk memahami bahwa perkumpulan ini berusaha untuk memastikan bahwa usaha mereka tidak terhalang.

Paguyuban Pasundan siap bekerja sama demi kepentingan bangsa dan tanah air. *Harian ini* menganggap peleburan Budi Utomo dan PBI sebagai bagian dari pergerakan politik Indonesia, dan sikap Paguyuban Pasundan juga dianggap benar. Soeara Katholiek juga menyatakan bahwa dia dapat memahami keputusan itu karena semangat persatuan pada saat itu belum kuat, dan masih banyak orang yang belum memahami benar manfaat persatuan Indonesia. Dikatakan bahwa semangat persatuan tidak muncul secara kebetulan, tetapi tumbuh seiring waktu. Surat kabar itu mempertanyakan mengapa Paguyuban Pasundan, yang memiliki dasar dan tujuan yang sama dengan Parindra, tidak mau bergabung dengannya (Sitorus, 1947). Mereka lebih memilih untuk tetap berdiri sendiri, sehingga mereka dapat lebih fokus pada nasib rakyat dan Tanah Pasundan. Disebutkan bahwa ini disebabkan oleh fakta bahwa individu mengambil tindakan nyata dalam upaya mereka untuk mencapai prinsip persatuan. Orang biasanya lebih memperhatikan hal-hal yang dekat dengan mereka daripada hal-hal yang jauh dari mereka. Menurutnya, lebih baik ada partai Pasundan dengan banyak anggota yang ingin bekerja untuk kepentingan rakyat dan Tanah Pasundan tidak membawa bahaya atau kerugian kepada Indonesia seluruhnya daripada tidak ada perkumpulan itu sehingga hanya sedikit orang dari Tanah Pasundan yang mau berpartisipasi dalam perkumpulan politik untuk memperhatikan nasib daerah mereka sendiri dan seluruh Indonesia.

Tidak lama setelah Soeara Katholiek menyatakan pendapatnya, majalah Sipatahoenan pada 10 Juni 1936 menerbitkan tulisan seseorang dengan nama samaran "B.S." yang membahas salah satu alasan mengapa Paguyuban Pasundan tidak ingin bergabung dengan Parindra. Dilaporkan bahwa Pasoendan tidak ingin melebur karena perkumpulan itu takut bahwa fusi itu tidak akan bertahan lama dan akan memiliki konsekuensi yang tidak diketahui secara menyeluruh (Ramelan, 1983). Mereka mengatakan bahwa mereka yang melebur akan kehilangan atau rugi jika terjadi kekacauan. Organisasi sosial yang didirikan oleh kelompok itu akan runtuh. Pasundan berpendapat bahwa fusi partai politik belum saatnya. Federasi cukup untuk mendapatkan kerja sama yang sesuai dari berbagai partai. Perihsl sikap Paguyuban Pasundan. Ada yang tidak setuju, dan beberapa bahkan menuduh perkumpulan itu provinsialistis. Pasundan menolak tuduhan itu karena organisasi itu mendukung persatuan antara semua bangsa Indonesia. Menurut pemimpinnya, persatuan dapat unitaristis atau federalistis. Persekutuan menginginkan persatuan dan membutuhkannya, hanya melalui federasi. Itu adalah semangat Pasundan untuk membangun persatuan Indonesia.

PPPKI menjadi lebih lemah setelah beberapa anggota melebur ke Parindra pada akhir tahun 1935. Paguyuban Pasundan, bersama dua organisasi lainnya, telah kehilangan informasi tentang PPPKI, dan badan federasi itu hanya simbol saja. Pada akhir Maret 1938, atas inisiatif PSII, Pasoendan menghadiri konferensi di Bandung (Lubis, & Herlina, 2012). Konferensi tersebut dihadiri oleh PSII, Parindra, dan Gerakan Rakjat (Gerindo) untuk membentuk badan kerja sama politik untuk menuju kongres Indonesia Raya. Pada prinsipnya semua setuju, dan rapat memberi PSII tugas untuk menyusun rencananya. Pada tanggal 4 Mei 1938, rapat pembentukan badan kerja sama itu diadakan, dan Badan Perantaraan Partai-partai Politik Indonesia (Bapeppi) didirikan. Dengan PSII sebagai satu-satunya partai yang sepenuhnya masuk, Paguyuban Pasundan tidak memperhatikan badan federasi itu, sehingga keberadaan Bapeppi tidak penting.

Pada tahun 1939, inisiatif Parindra memicu keinginan untuk membentuk badan federasi. Untuk menyampaikan maksud itu, Oto Iskandar di Nata dan pemimpin partai lainnya didekati. Dalam kongresnya yang ke-24 pada bulan April 1939, Paguyuban Pasundan setuju bahwa setiap upaya para pemimpin untuk mencapai tujuannya harus didasarkan pada sikap saling menghargai dan bahwa upaya itu harus lebih dari sekedar demonstrasi. Dalam kongres itu, Oto Iskandar di Nata mendesak Belanda untuk mengubah sikapnya terhadap jajahan-jajahannya karena bahaya internasional. Setelah Moh. Husni Thamrin dihubungi, partai-partai lain akhirnya menyatakan persetujuannya. Atik Soeari, S. Soeradiredja, dan Ir. Oekar Bratakoesoemah dari Paguyuban Pasundan menghadiri pertemuan untuk membentuk badan federasi baru di Jakarta pada 21 Mei 1939. Dengan suara bulat, rencana yang diusulkan oleh Moh. Husni Thamrin disetujui. Badan federasi ini disebut sebagai Gabungan Politik Indonesia (Gapi). Sampai Pemerintah Hindia Belanda berakhir pada tahun 1942, Paguyuban Pasundan menjadi anggota. Adanya Paguyuban Pasundan dalam Bapeppi dan kemudian Gapi karena keduanya merupakan federasi, yang berarti partai politik bekerja sama untuk mencapai cita-cita bersama. Dengan kata lain, Paguyuban Pasundan yang menjadi anggota federasi tetap dapat melaksanakan cita-citanya (Suharto, 2002).

Kegiatan Organisasi Paguyuban Pasundan Tahun 1927-1942

Kegiatan suatu kelompok (dalam hal ini Paguyuban Pasundan) dapat menunjukkan keberadaannya selama suatu periode pergerakan nasional. Sejak tahun 1927, ketika perkumpulan itu menjadi anggota badan federasi PPPKI, hingga tahun 1942, ketika perkumpulan itu dibubarkan oleh Jepang, bersama dengan perkumpulan politik lainnya. Diharapkan bahwa penjelasan tentang kegiatan perkumpulan itu, terutama dari tahun 1927 hingga 1935, akan memberikan alasan mengapa mereka tidak ingin bergabung dengan Parindra. Untuk memasukkan Paguyuban Pasundan ke dalam kategori gerakan nasional, aktivitasnya harus dijelaskan sampai tahun 1942. R. Oto Koesoemah Soebrata dan R. Oto Iskandar di Nata memimpin Paguyuban Pasundan selama hampir 15 tahun itu, dan perkumpulan mengalami kemajuan pesat sejak dipimpin oleh Oto Iskandar

di Nata. Paguyuban Pasundan, yang didirikan pada tahun 1931, bekerja sampai tahun 1942 (Ramelan, 1983).

Selama perjalanannya, Paguyuban Pasundan melakukan aktivitasnya di bidang politik. Di tingkat lokal (Dewan Kotapraja, Dewan Kabupaten, dan Dewan Propinsi), serta di tingkat nasional (*Volksraad*) dan di luar dewan, operasi ini dilakukan. Dalam pidato pembukaan kongresnya di Cirebon tahun 1937, R. Oto Iskandar di Nata menjelaskan mengapa Paguyuban Pasundan memilih politik perjuangan karena dianggap sebagai senjata yang sangat ampuh jika orang yang menggunakannya memiliki tiga syarat: kekuatan batin dan mental, kekuatan uang, dan solidaritas (Faluh, 2010). Menurutnya, syarat-syarat itu tidak ada di kalangan orang Indonesia pada saat itu, sehingga politik tidak berguna dalam pelaksanaannya, bahkan dapat mengacaukan pergerakan.

Perkumpulan menetapkan aturan untuk anggota dewan. Terhadap wakilnya di *Volksraad*, mereka harus mempertahankan prinsip "Indonesia Mulia" di lembaga tersebut dan memberikan janji partainya tentang berbagai masalah yang telah dibahas secara menyeluruh. Selain itu, karena jumlah anggota dewan lokal yang semakin meningkat, pedoman diperlukan. Pengurus Besar dan wakil-wakilnya dalam dewan-dewan lokal berkumpul beberapa kali dalam hal ini. Selama konferensi itu, satu hal yang sangat diperhatikan adalah bagaimana sikap wakil-wakil itu: apakah mereka harus berposisi atau sebaliknya bergabung dengan lembaga pemerintah. Terakhir, konferensi memutuskan bahwa anggota Paguyuban Pasundan dapat mengambil bagian dalam badan pemerintah, tetapi mereka harus melakukannya dengan berpegang pada prinsip "bekerja untuk kepentingan umum dengan pikiran tenang dan maksud suci." Karena wakil dari partai lain berhadapan untuk tidak merusak atau merendahkan partainya, diharapkan dalam dewan lokal untuk membentuk fraksi nasional. Wakil Paguyuban Pasundan harus bergabung dengan wakil dari partai lain (Jamaludin, 2019).

Sejak didirikan *Volksraad*, perkumpulan ingin mempunyai wakil di dalamnya pada tingkat nasional. Selama periode pertama (1918-1921), karena belum ada kandidat untuk jabatan itu, calon anggota yang dekat dengannya dibantu. Hal ini juga berlaku untuk periode kedua (1921-1924), ketiga (1924-1927), dan keempat (1927-1931). Dengan demikian, Paguyuban Pasundan memiliki wakil dan R. Oto Koesoema Soebrata adalah anggota yang didukung dari tahun 1927 hingga 1931. Meskipun demikian, ia meletakkan jabatannya karena masalah kesehatan dan digantikan oleh Idih Prawiradipoetra. R. Oto Iskandar di Nata adalah wakil Paguyuban Pasundan untuk periode berikutnya. Dia menjabat selama tiga periode, hingga tahun 1942. Sejak tahun 1927–1942, Paguyuban Pasundan selalu terlibat dalam peristiwa nasional. Perkumpulan itu ikut serta dalam pembentukan PPPKI di Bandung pada tahun 1927 (Suhardi, 2004). R. Oto Koesoema Soebrata (sebagai Ketua Pengurus Besar pada saat itu), Bakrie Soeraatmadja, dan Soetisna Sendjaja mewakili Paguyuban Pasundan dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh wakil dari PNI, BO, Parsas, Serikat Soematera, Kaum Betawi, Indonesische Studieclub, dan Paguyuban Pasundan, badan federasi itu berhasil didirikan. Anggota badan federasi itu adalah Paguyuban Pasundan dan kelompok lain.

Tahun 1932, ada masalah di bidang pendidikan karena pemerintah kolonial mengeluarkan *Wilde Scholen Ordonantie* (WSO). Ordonansi ini dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1932 dalam upaya untuk menghentikan sekolah swasta di Indonesia. Kaum pergerakan menentang keras ordonansi itu. Ki Hadjar Dewantara, pendiri dan pemimpin Taman Siswa yang didirikan pada tahun 1922, memulai inisiatif perlawanan, yang mendapat sambutan baik dari kaum pergerakan. Dalam hal ini, Paguyuban Pasundan cabang Palembang menentang undang-undang tersebut. Selanjutnya, kongres Paguyuban Pasundan memutuskan untuk menentang undang-undang tersebut dan akan menarik wakilnya dari dewan jika undang-undang tersebut tidak diubah. Hampir empat tahun kemudian, perhatian kaum pergerakan tertuju pada proposal Soetardjo Kartohadikoesoemo—juga dikenal sebagai petisi Soetardjo—setelah gerakan nasional terfokus pada WSO (Suharto, 2002). Petisi itu diserahkan ke *Volksraad* pada 15 Juli 1936. Dalam menanggapi petisi itu, ada tiga kelompok anggota Fraksi Nasional: sebagian menolak, sebagian menyetujui, dan sebagian lagi setuju dengan syarat. Oto Iskandar di Nata, anggota fraksi tersebut, termasuk dalam kelompok terakhir. Petisi itu

akhirnya disetujui setelah diskusi, dengan 26 suara setuju dan 20 menolak. Petisi itu juga dikirim ke pemerintah Belanda.

Paguyuban Pasundan menyalurkan sikap Menteri Colijn dalam Staten Generaal mengenai petisi ini, yang menyatakan bahwa menambah otonomi Indonesia tidak diperlukan. *Centraal Comitte Petitie Soetardjo* (CCPS) dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1937 untuk mengumpulkan tanda tangan untuk menggolkan petisi. Oto Iskandar di Nata dan Atik Soeari mewakili Paguyuban Pasundan dalam komite. Dalam kongresnya di Sukabumi pada bulan April 1938, Paguyuban Pasundan memutuskan untuk menyokong petisi itu. Oto Iskandar di Nata menjelaskan alasan dia menyokong petisi di kongres. Dijelaskan bahwa jika petisi diterima, rakyat akan memiliki banyak kesempatan untuk menyampaikan keinginan mereka, dan pemerintah dan pihak Indonesia tidak akan mencurigai satu sama lain.

Ada upaya untuk membentuk konsentrasi di seluruh negeri, menurut Kongres Paguyuban Pasundan di Cianjur pada bulan April 1939. Kongres kemudian memutuskan bahwa organisasi menyetujui setiap upaya untuk meningkatkan kekuatan bangsa untuk meningkatkan derajatnya asli didasarkan pada hal-hal berikut: 1. usaha itu harus dilakukan dengan semangat suci; 2. usaha itu harus benar-benar didasarkan pada saling hormat-menghormati; 3. usaha itu harus dilakukan dari atas ke bawah; dan 4. usaha itu tidak boleh dilakukan hanya sebagai demonstrasi. Kongres memutuskan untuk memberi mandat sepenuhnya kepada Pengurus Besar untuk berpartisipasi dalam membangun konsentrasi nasional dengan mempertimbangkan hal-hal di atas. Oto Iskandar di Nata mendesak dalam kongresitu agar Nederland mengubah sikapnya terhadap jajahan-jajahan karena ancaman internasional.

Kegiatan yang dilakukan Paguyuban Pasundan di bidang politik dilakukan dalam dewan-dewan, baik di tingkat lokal (dewan kotapraja, Dewan Kabupaten dan Dewan Propinsi) maupun di tingkat nasional (*Volksraad*) dan di-luar dewan-dewan. Sejak tahun 1931 dibawah pimpinan Otto Iskandar Di Nata perhatian Paguyuban Pasundan dipusatkan pada bidang politik yaitu berjuang untuk memperoleh kursi di dewan kabupaten dan dewan propinsi. Bagi paguyuban pasundan pergerakan politik ini digunakan sebagai alat untuk mencapai perbaikan di bidang ekonomi, sosial dan bidang lainnya (Lubis, & Nina, 2003).

Pada kegiatan ekonomi paguyuban Pasundan terbagi dalam dua kegiatan yaitu Perbankan dan Koperasi. Bank *Central* Pasundan dibentuk pada kongres ke-19 yang berlangsung pada 30 Maret 1934 sampai dengan 1 April 1934, muncul gagasan untuk membentuk suatu pimpinan pusat yang akan mengumpulkan modal guna meningkatkan semangat berusaha. Dari gagasan tersebut dibentuklah sebuah Bank di tingkat Pusat yaitu Bank *Central* Pasundan dengan modal berupa saham seberal F 50.000,- yang setiap lembar sahamnya mempunyai nilai nominal f 10,- Tujuan didirikannya Bank *Central* Pasundan ini untuk mengelola keuangan Paguyuban Pasundan baik itu dari pemasukan pendidikan, mengelola pinjaman dan mengelola kegiatan perbankan lainnya. Bank *Central* Pasundan ini pada awalnya bertempat di Batavia sama dengan sekretariat pusat Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, namun ikut pindah ketika sekretariat Paguyuban Pasundan pindah Ke Bandung.

Kegiatan ekonomi Paguyuban Pasundan yang lain yaitu kegiatan Koperasi. Pada Masa Kepemimpinan Oto ada juga kegiatan berwirausaha, koperasi ini dikelola oleh cabang-cabang pasundan. Hampir setiap cabang Organisasi Paguyuban Pasundan mempunyai Koperasi yang didirikan untuk memberikan bantuan keuangan bagi anggota yang memerlukan dan tabungan bagi para anggota Paguyuban Pasundan. Selain itu kegiatan Koperasi Paguyuban Pasundan yaitu menyediakan alat-alat pertanian dan kebutuhan petani lainnya. Maka dari itu di beberapa cabang Paguyuban Pasundan Koperasi ini disebut Koperasi Paguyuban Tani.

Paguyuban Pasundan juga melakukan kegiatannya pada bidang pendidikan dibuktikan dengan pada masa kepemimpinan Oto Iskandar Di Nata organisasi Paguyuban Pasundan mendirikan sekolah yang Bernama sekolah Pasundan yang berdiri di berbagai daerah, karena menurut Oto bahwa satu-satunya jalan untuk melawan penjajah adalah dengan meningkatkan

sumber daya manusia melalui pendidikan. Tahun 1931 diadakan kongres di Bogor, hasil kongres tersebut yaitu:

1. Mendirikan *Studiefonds* (Beasiswa) Pasundan yang telah direncanakan sejak 10 Tahun kebelakang.
2. Mendirikan Bale Pamoelangan Pasundan (BPP) yaitu badan yang mempunyai tugas mengkoordinir, membina dan mengawasi sekolah-sekolah Pasundan yang saat itu telah menyebar hampir ke seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil kongres tersebut maka Pada Masa kepemimpinan Oto di Paguyuban Pasundan dalam bidang pendidikan ini didirikan Bale Pamulangan Pasundan yang mempunyai tugas untuk mengurus sekolah-sekolah pasundan yang terbagi di berbagai wilayah Pasundan. Sekolah Paguyuban Pasundan Pertama didirikan yaitu HIS bersubsidi di Tasikmalaya dan MULO yang juga didirikan di Tasikmalaya, sekolah ini didirikan tahun 1930. Kemudian Tahun 1935 Organisasi Paguyuban Pasundan telah mempunyai 29 sekolah dengan jumlah guru 112 dan 3000 orang siswa (Suharto, 2002). Hingga saat ini ada beberapa sekolah-sekolah Pasundan yang masih berdiri bahkan Organisasi Paguyuban Pasundan berhasil mendirikan Perguruan Tinggi yaitu Universitas Pasundan. Organisasi Paguyuban Pasundan merupakan Organisasi yang masih bertahan dari zaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Bagi Organisasi. Paguyuban Pasundan Pendidikan merupakan salah satu cara yang mampu mengangkat dan memperbaiki nasib rakyat dari kemiskinan dan keterbelakangan.

PENUTUP

Sejarah Paguyuban Pasundan antara tahun 1913-1942. Organisasi ini lahir karena terjadi kekecewaan kepada organisasi Budi Utomo yang lebih mengutamakan kepentingan orang Jawa dan Madura. Sehingga karena faktor tersebut berdirilah organisasi yang mewadahi orang Sunda yaitu Paguyuban Pasundan. Pada awal berdirinya organisasi Paguyuban Pasundan bergerak demi kepentingan orang Sunda namun ketika angin Nasionalisme masuk ke Indonesia yang tentunya merubah cara pandang Paguyuban Pasundan tentang perjuangan, Ideologi Nasionalisme muncul dan mulai menyebar di Indonesia kemudian berdiri Partai Nasional Indonesia di bawah Pimpinan Ir. Soekarno. Ideologi baru itu diterima oleh Paguyuban Pasundan dan beberapa perkumpulan serupa lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan dibentuknya suatu komite "Persatuan Indonesia" yang bertujuan untuk mempersatukan berbagai kelompok politik di kalangan pergerakan nasional, Paguyuban Pasundan masuk menjadi anggota komite tersebut bersama dengan perkumpulan lainnya seperti Muhammadiyah, JIB, Persatuan Minahasa, Sarekat Ambon, dan Sarekat Madura. Ikut sertanya Paguyuban Pasundan dalam komite tersebut menunjukkan bahwa perkumpulan itu menghendaki juga adanya persatuan nasional dan hal itu berarti paguyuban pasundan telah menerima ideologi nasionalisme (nasionalisme Indonesia), dengan diterimanya ideologi nasionalisme itu, maka Paguyuban Pasundan berubah sifat perkumpulannya dari perkumpulan etnis menjadi perkumpulan nasionalis.

Pada tahun 1927 dan tahun 1931 merupakan tahun-tahun penting. Tahun 1927 mulai beralihnya pergerakan paguyuban pasundan dari perkumpulan etnis menjadi nasionalis yang ditanyai dengan bergabungnya Paguyuban Pasundan dengan PPPKI, yang pada awalnya hanya mementingkan kepentingan daerah yaitu sunda menjadi perkumpulan nasional yang mempunyai tujuan nasional yaitu kemerdekaan bangsa. Walaupun pada akhirnya Paguyuban Pasundan tetap menjadi perkumpulan etno-nasionalis yaitu perkumpulan nasiona yang bekerja untuk suatu daerah yaitu Jawa Barat tetapi peranannya sangat bermanfaat untuk masyarakat luas tidak hanya orang Sunda. Adapun aktifitas dari organisasi paguyuban pasundan meliputi beberapa bidang yaitu bidang politik, ekonomi dan sosial, dan bidang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (1972). *Sedjarah Jawa Barat. Suatu Tanggapan*. Bandung: Pemda Jawa Barat.
Amin, S. (1984). *Perjuangan Paguyuban Pasundan, 1941-1942*. Bandung: Sumur Bandung.

- Andre, B. I. (2017). Kiprah Politik Paguyuban Pasundan Periode 1927-1959. *DIAKRONIKA*, 17(1), 76–89.
- Azmi, N. N., & Widodo, S. (2020). Pagoejoeban Pasoendan: Dinamika Organisasi Masyarakat di Bandung 1985-2008. *Historiografi*, 1(2), 1–11.
- Cooper. (2017). Research synthesis and meta-analysis. *American Psychological Association*, 6(1), 98–110.
- Creswell. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (Keempat)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dimiyati, & Muhammad. (1950). *Sedjarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pembangunan.
- Edi, S. (2004). *Fatimah In West Java Moral Admonitions to Sundanese Gentlewomen*. Bandung: Pusat Studi Sunda.
- Ekadjati, E. S. (2004). *Paguyuban Pasundan Sebuah Kebangkitan Kembali Orang Sunda 1913-1918*. Bandung: Ar-Ruzz.
- Ekadjati, E. S. (2014). *Dari pentas sejarah sunda sangkuriang hingga juanda*. Bandung: PT Kiblat Buku Utama.
- Erawan, F., & Memed, N. (1991). *Paguyuban Pasundan di Tengah-Tengah Kancah Perjuangan Bangsa*. Bandung: Mandalawangi.
- Falah, S. (2010). *Sejarah Kota Tasikmalaya 1820-1942*. Tasikmalaya: Pemkab Tasikmalaya.
- Fauziah, K. (2023). Antara Negara Pasundan Kartalegawa Dengan Negara Pasundan Wianatakusumah (1947-1950). *Historia Vitae*, 3(1), 1–12.
- Frakking, R. (2016). Gathered on the Point of a Bayonet: The Negara Pasundan and the Colonial Defence of Indonesia, 1946-1950. *The International History Review*, 39(1), 30–47.
- Hendayana, T. (2016). *Paguyuban Pasundan Kekinian 2000-2016*. Bandung: Paguyuban Pasundan Pers.
- Irshanto, B. A. (2016). Kiprah Politik Paguyuban Pasundan Periode 1927-1959. *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 2(2), 1–10.
- Jamaludin, A. N. (2019). Model Kepemimpinan Sunda Jawa Barat. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(1), 34–61.
- Lubis. (2015). *Sejarah Jawa Barat Jilid 2*. Bandung: YMSI Jawa Barat.
- Lubis. (2016). *Sejarah Kota Bandung*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Lubis, & Herlina, N. (2003). *Sejarah Tatar Sunda, Jilid 2*. Bandung: Satya Historika.
- Lubis, & Herlina, N. (2012). *Sejarah Kabupaten Karawang*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Moleong, J. L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Mulyana, A. (1999). Pergumulan Elite Sunda Pada Massa Revolusi: Kasus Berdiri dan Bubarnya Negara Pasundan 1947-1950. dalam Sri Sutjiatningsih (Ed.), *Kongres Nasional Sejarah 1996 Subtema: PEMIKIRAN DAN ANALISIS TEKS SEJARAH II*. Jakarta: CV Ilham Bangun Karya.
- Nitisastro, & Widjojo. (1970). *Population Trends in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- Ramelan, H. (1983). *Sejarah Pagoejoeban Pasoendan (1914-1982)*. Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: penerbit Serambi.
- Shandy, & Oom, K. (2018). Etnonasionalisme Paguyuban Pasundan dalam asas tunggal Pancasila 1980-1990: Dari pergerakan Politik ke Sosial Budaya. *Historiografi*, 6(1), 153–163.
- Sitorus, L. M. (1947). *Sedjarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto. (2002). *Pagoejoeban Pasoendan 1927-1942 (Profil Pergerakan Etno - nasionalis)*. Bandung: Satya Historika.
- Utomo, B. (1995). *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan*. Semarang: Ikip Semarang Press.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan (Pertama)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.